



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) TAHUN 2023

BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

bangga
melayani
bangsa



DINAS TENAGA KERJA KOTA CIMAHI



KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia Nya serta member petunjuk, sehingga kami dapat menyusun Laporan Kinerja Dinas Tenaga Kerja Kota Cimahi Tahun 2023.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Tenaga Kerja Kota Cimahi Tahun 2023, disusun mengacu kepada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tanggal 1 Desember 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Penyusunan LKIP Dinas Tenaga Kerja Tahun 2023 ini diharapkan semaksimal mungkin dapat memberikan informasi kinerja yang terukur atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai, serta melalui laporan ini dapat memberikan upaya perbaikan yang berkesinambungan bagi kinerja Dinas Tenaga Kerja Kota Cimahi selain itu juga mampu memberikan manfaat bagi masyarakat sebagai wujud peningkatkan kinerja dalam mewujudkan visi, misi, tujuan Pemerintah Kota Cimahi dalam bidang ketenagakerjaan.

Semoga LKIP Dinas Tenaga Kerja Kota Cimahi Tahun 2023 ini dapat bermanfaat, walaupun kami menyadari masih terdapat kekurangan dan keterbatasan pada penyusunan Laporan Kinerja ini. Dengan kerendahan hati, saran, kritik dan masukan yang bersifat membangun sangat kami harapkan guna hasil lebih baik di masa mendatang.

Cimahi, Maret 2024

**KEPALA DINAS TENAGA KERJA
KOTA CIMAHI**



ASEP AJAT JAYADI, S.E., M.M.

PEMBINA

NIP. 19730620 199612 1 003



IKHTISAR EKSEKUTIF

IKHTISAR EKSEKUTIF Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Tenaga Kerja Kota Cimahi Tahun 2023 menyajikan informasi target dan capaian sasaran dan Indikator Kinerja Utama di Dinas Tenaga Kerja Kota Cimahi berdasarkan dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2023 yang mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) Dinas Tenaga Kerja Kota Cimahi tahun 2023-2026. Sasaran Dinas Tenaga Kerja Kota Cimahi adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya Kompetensi Pencari Kerja

dengan indikator :

- Persentase Pencari Kerja Terdaftar yang memiliki standar Kompetensi
 - Indikator Persentase pencari kerja terdaftar yang memiliki standar kompetensi ditargetkan 90% dan tercapai sebesar 100 % dengan tingkat capaian indikator 111 %;

Dinas Tenaga Kerja Kota Cimahi selama Tahun 2023 telah melaksanakan kegiatan yang menunjang peningkatan kompetensi pencari kerja dengan total Peserta Pelatihan sebanyak 825 Orang

- Melalui APBD sebanyak 295 Orang
 - Pelatihan Barista Coffe sebanyak 20 Orang
 - Pelatihan Make Up Artis sebanyak 20 Orang
 - Pelatihan Teknik Las sebanyak 30 Orang
 - Pelatihan Menjahit Busana Industri sebanyak 200 Orang
 - Pelatihan Jasa Konstruksi sebanyak 10 Orang
 - Pelatihan Barbershop sebanyak 15 Orang
- Melalui Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) sebanyak 530 Orang
 - Pelatihan Menjahit Busana Industri 150 Orang
 - Pelatihan Kuliner 100 Orang
 - Pelatihan IT Digital Marketing 135 Orang
 - Pelatihan Vaporista 110 Orang
 - Pelatihan dan Capacity Building Y Not 35 Orang

2. Meningkatnya kesempatan kerja

dengan indikator :

Persentase Tenaga Kerja Yang Ditempatkan ;

Indikator Persentase pencari kerja terdaftar yang ditempatkan ditargetkan 78 % dan tercapai 89,64 % dengan tingkat capaian indikator 114,92 %.

Untuk Tahun 2023 Dinas Tenaga Kerja Kota Cimahi telah berhasil menempatkan sebanyak 1,835 orang pencari kerja, meningkat dari tahun sebelumnya sebanyak 1495 orang.

- 1) BKK : 371 Orang
- 2) LPK : 49 Orang
- 3) Sidakep Tri : 392 Orang
- 4) CPMI : 61 Orang
- 5) Pelatihan : 720 Orang
- 6) Job Fair : 242 Orang

3. Meningkatnya Kesejahteraan Buruh dan Keharmonisan Hubungan Industrial dengan indikator :

Persentase perselisihan buruh dan pengusaha yang diselesaikan.

Indikator Persentase perselisihan buruh dan pengusaha yang diselesaikan ditargetkan 90 % dan tercapai 100 % dengan tingkat capaian indikator 111 %.

Upaya pencapaian kondusifitas ketenagakerjaan, Disnaker juga berhasil meningkatkan jumlah kepesertaan BPJS Tenaga Kerja sebanyak 1113 Perusahaan atau 67,95% dari total 1638 Perusahaan dengan Jumlah peserta BPJS Tenaga Kerja sebanyak 53.667 orang atau 86.51%. Selain itu jumlah perusahaan yang menerapkan Upah Minimum Kota juga meningkat menjadi 243 perusahaan atau 14,84%. Sedangkan jumlah perusahaan yang mempekerjakan kaum Disabilitas sedikit meningkat menjadi 145 orang dari semula 143 orang.

Dalam hal penyelesaian perselisihan hubungan industrial, dengan semakin stabilnya kondisi perekonomian secara makro, sangat berpengaruh terhadap kondusifitas industri di Kota Cimahi, hal ini dibuktikan dengan penurunan jumlah Perselisihan yang terjadi di tahun

2023. Dengan merebaknya Pandemi Covid 19 beberapa tahun terakhir mengakibatkan perselisihan yang di laporkan ke Dinas Tenaga Kerja sangat tinggi. Namun dengan dilakukannya Pembinaan secara efektif, intensif dan berkesinambungan serta pelaksanaan konsolidasi dengan serikat pekerja/serikat buruh dan pengusaha di Kota Cimahi telah berhasil menurunkan jumlah perselisihan yang di laporkan ke Dinas Tenaga Kerja dengan signifikan menjadi 31 Kasus.

Untuk menunjang keberhasilan pencapaian sasaran tersebut, Dinas Tenaga Kerja Memperoleh dukungan anggaran belanja langsung sebesar Rp11.872.240.800 dengan Realisasi anggaran Rp11.141.936.138 (93,85%) sehingga Dinas Tenaga Kerja Kota Cimahi melakukan efisiensi anggaran sebesar Rp. 730.304.662 atau 6.15%.

4. Inovasi Sidakeptri Mobile

Selain itu Dinas Tenaga Kerja Kota Cimahi juga berhasil mengembangkan inovasi ketenagakerjaan dengan kebijakan “System Informasi Data Ketenagakerjaan dan Pelatihan Terintegrasi (SidakepTri)” mobile yaitu:

- 1) Perbaikan pembuatan AK-1 melalui Mobile untuk diproses yaitu di menu pengambilan foto, upload foto dan pencetakan kartu AK-1.
- 2) WA Blast
- 3) Aplikasi Whatsaapp yang dapat mengirimkan broadcast pesan kepada Pencaker/LPK/BKK
- 4) Pembuatan dashboard/tampilan menu dalam bentuk angka untuk menampilkan rekapitulasi data pencari kerja yang masuk secara realtime, sehingga bisa diperoleh data per kecamatan, kelurahan, pendidikan terakhir, usia dan jenis kelamin
- 5) Perbaikan di menu data perusahaan dibuatkan dengan sistem komunikasi dua arah yaitu dengan adanya notifikasi lowongan pekerjaan dan pelatihan bagi pencari kerja
- 6) *Tracer Study*
- 7) Perusahaan, LPK dan BKK dapat memberikan laporan penempatan tenaga kerja, pencari kerja dan lowongan pekerjaan yang diterima

- 8) Sistem UpSkilling
- 9) Pelatihan secara online melalui Video Tutorial Pelatihan (E-SkillUp)
- 10) Pembuatan laporan (mapping) dalam format Excel maupun pdf, baik untuk laporan perusahaan, LPK, maupun BKK dan laporan BKOL (AK-1) sesuai dengan format Dinas
- 11) Menu pengaduan pencari kerja di Aplikasi Sidakeptri dapat mengirim kritik dan saran

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Tenaga Kerja Kota Cimahi ini, diharapkan dapat memberikan gambaran Kinerja Dinas Tenaga Kerja Kota Cimahi kepada pihak-pihak terkait berdasarkan hasil pengukuran, tingkat pencapaian sasaran Dinas Tenaga Kerja Kota Cimahi tahun 2023.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pembangunan Daerah merupakan salah satu sub sistem dari pembangunan nasional yang meliputi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang ditujukan untuk meningkatkan harkat, martabat dan memperkuat jati diri serta kepribadian masyarakat dalam pendekatan lokal, nasional dan global. Dalam perspektif perencanaan pembangunan, Pemerintah Daerah harus memperhatikan keseimbangan berbagai aspek dalam satu kesatuan wilayah pembangunan ekonomi, hukum, sosial, budaya, politik, pemerintahan dan lingkungan hidup untuk mendukung pembangunan yang berkelanjutan, dengan diikuti oleh penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel (*Good Governance*).

Pemerintahan yang akuntabel merupakan sebuah keharusan yang perlu dilaksanakan dalam usaha mewujudkan visi misi pembangunan daerah dan aspirasi serta cita-cita masyarakat dalam mencapai masa depan yang lebih baik. Berkaitan dengan hal itu, diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas dan terukur, sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Salah satu tuntutan publik pada saat ini adalah adanya transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara. Muara tuntutan ini pada intinya adalah terselenggaranya tata Pemerintahan yang baik (*Good Governance*), sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan LKIP Dinas Tenaga Kerja Kota Cimahi Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara yang bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2001 tentang Pembentukan Cimahi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4116);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- undangan;
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemda;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Laporan Kinerja Instansi;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;

14. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
15. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
16. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tanggal 1 Desember 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

1.3 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi SKPD

Sebagai unsur pelaksana yang melaksanakan sebagian urusan Pemerintah Daerah di Bidang Ketenagakerjaan dan Transmigrasi, Dinas Tenaga Kerja Kota Cimahi memiliki Tugas Pokok dan Fungsi sesuai dengan Peraturan Wali Kota Cimahi Nomor 59 Tahun 2021, tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Cimahi adalah melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang yang mempunyai wilayah kerja wewenang Daerah di bidang tenaga kerja dan transmigrasi dan yang menyelenggarakan fungsi perumusan kebijakan teknis, urusan pemerintahan dan pelayanan umum, pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang Tenaga Kerja dan Transmigrasi meliputi Pelatihan dan Penempatan Tenaga Kerja dan Hubungan Industrial serta Transmigrasi, pelaksanaan urusan Kesekretariatan terdiri atas Sekretaris dan 2 Sub Bagian. Adapun fungsi Dinas Tenaga Kerja Kota Cimahi berdasarkan Peraturan Daerah tersebut di atas adalah:

1. Perumusan kebijakan Urusan Pemerintahan di bidang tenaga kerja dan transmigrasi;
2. Pelaksanaan kebijakan Urusan Pemerintahan di bidang tenaga kerja dan transmigrasi;
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Urusan Pemerintahan di bidang tenaga kerja dan transmigrasi;

4. Pelaksanaan administrasi Dinas Tenaga Kerja;
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wali Kota terkait dengan tugas dan fungsinya.

Tugas pokok dan fungsi yang diemban oleh Dinas Tenaga Kerja Kota Cimahi dilakukan secara profesional oleh Sumber Daya Aparatur yang ada di dalamnya dan tergambar pada struktur organisasi sebagai berikut :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, membawahi :
 1. Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
 2. Subbagian Program dan Keuangan.
- c. Bidang Pelatihan, Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi membawahi :
 1. Instruktur Ahli Muda Instruktur; dan
 2. Seksi Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi.
- d. Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja, membawahi :

Mediator Ahli Muda Hubungan Industrial.
- e. Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Daerah;

Kelompok Jabatan Fungsional.

Sumber daya aparatur pada Dinas Tenaga Kerja saat ini adalah sebagai berikut :

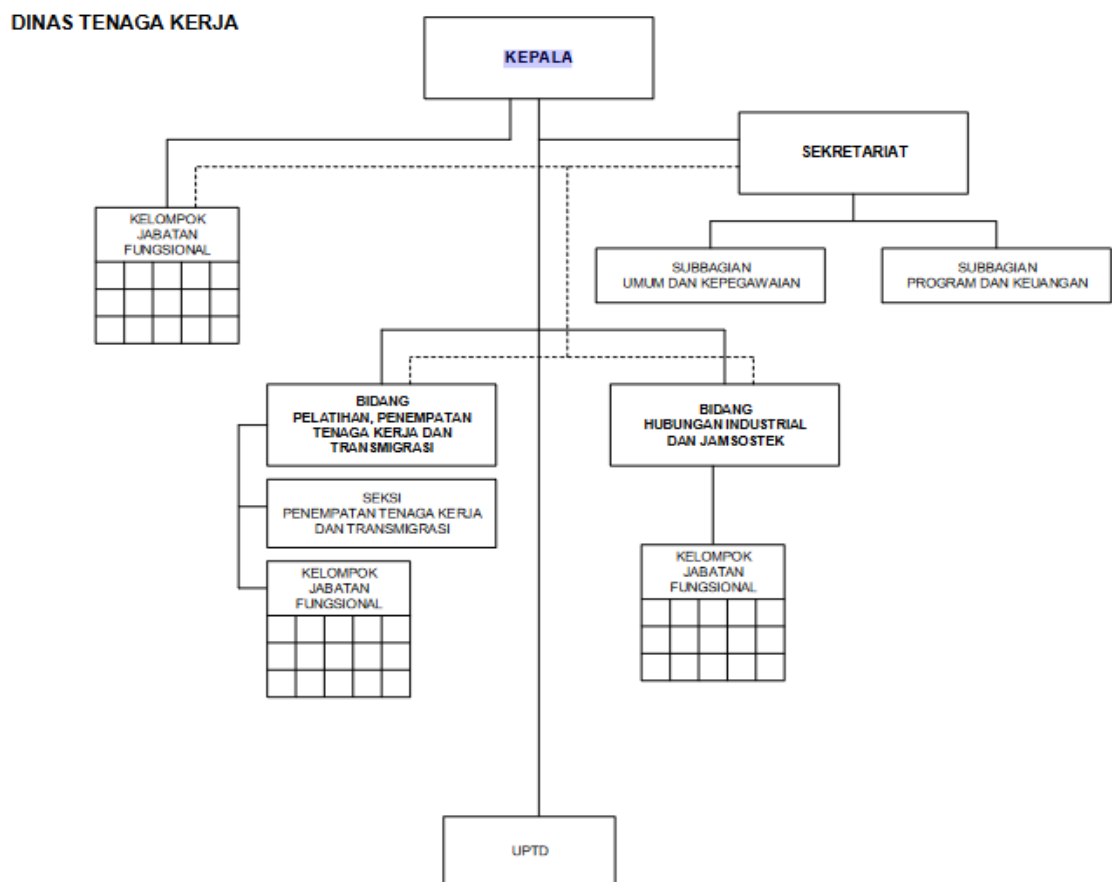
- | | |
|---------------------------|-------------------|
| a. Jabatan eselon II.b | : 1 orang |
| b. Jabatan eselon III.a | : 1 orang |
| c. Jabatan eselon III.b | : 2 orang |
| d. Jabatan eselon IV.a | : 3 orang |
| e. Jabatan Fungsional | : 3 orang |
| f. Unsur Pelaksana | : 13 orang |
| g. Unsur PPPK | : 1 orang |
| Jumlah keseluruhan | : 24 orang |

Gambaran Pegawai Dinas Tenaga Kerja Kota Cimahi dilihat dari aspek golongan, pendidikan dan masa kerja adalah sebagai berikut:

No	Jabatan/Bagian	Pangkat/ Golongan Ruang	Jenjang pendidikan/jurusan	Jumlah Personil
1.	Kepala Dinas	Pembina Utama Muda, IV/c	S2/Magister Managemen Sumber Daya Manusia	1
2.	Sekretaris	Pembina, IV/a	S2/Administrasi Publik	1
3.	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;	Penata, III/d	S1/ Ilmu Administrasi Negara	1
4.	Kepala Sub Bagian Program dan Keuangan	Penata Tingkat I, III/d	S1/ Ilmu Administrasi Negara	1
5.	Kepala Bidang Pelatihan, Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Pembina, IV/a	S1/ Manajemen Pembangunan Daerah	1
6.	Kepala Seksi Penempatan dan Transmigrasi	Penata Tingkat I, III/d	S1/ Ilmu Hukum	1
7.	Kepala Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja	Pembina, III/d	S.1/Ilmu Administrasi Negara	1
8.	Mediator Hubungan Industrial Ahli Muda.	Penata Tingkat I, III/d	S.1/Ilmu Hukum	1
9.	Mediator Hubungan Industrial Ahli Pertama.	Penata Muda, III/a	S.1/Ilmu Hukum	1
10.	Pengantar Kerja Ahli Pertama.	Penata Muda, III/a	S.1/Administrasi Bisnis	1
11.	Ahli Pertama Pengantar Kerja.	Penata Muda/IX	S.1/Manajemen	1

1.4 Gambaran Umum Organisasi

Struktur Organisasi Dinas Tenaga Kerja Kota Cimahi Tahun 2022 telah mengalami perubahan dengan memperhatikan tuntutan kebutuhan organisasi. Struktur Organisasi Dinas Tenaga Kerja Kota Cimahi berdasarkan Peraturan Wali Kota Cimahi Nomor 59 Tahun 2022, tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Cimahi, sebagaimana tergambar di bawah ini sebagai berikut :



1.5 Permasalahan Dan Isu - Isu Strategis

Permasalahan dan isu-isu strategis merupakan salah satu bagian terpenting dokumen LKIP karena menjadi dasar utama visi dan misi pembangunan jangka menengah. Oleh karena itu, penyajian analisis ini harus dapat menjelaskan butir-butir penting isu-isu strategis yang akan menentukan kinerja pembangunan dalam 5 (lima) tahun mendatang. Penyajian isu-isu strategis meliputi permasalahan pembangunan daerah dan isu strategis.

Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD :

- a. Belum optimalnya sinergitas diantara stakeholder terkait yang dikenal dengan istilah 5 pilar ketenagakerjaan, yaitu Pemerintah (*Government*), Perusahaan (*Company*), akademisi (*Academy*), pelatih (*Trainer*) dan pencari kerja (*employee/job seeker*);
- b. Adanya ketidaksesuaian yang menyebabkan terjadinya kesenjangan yang terjadi antara jumlah lulusan dengan jumlah kebutuhan dunia kerja (dimensi kuantitas), kesenjangan kompetensi lulusan dengan kompetensi yang di butuhkan dunia kerja (dimensi kualitas), ketidakmampuan wilayah/daerah setempat menyerap lulusan (dimensi lokasi), dan perubahan kondisi ekonomi baik lokal, nasional, global dan lead time pendidikan (dimensi waktu).
- c. Ketidakpastian Ekonomi Lokal atau nasional, baik disebabkan oleh faktor internal maupun eksternal yang menyebabkan perusahaan-perusahaan enggan merekrut lebih banyak pekerja
- d. Banyaknya industri di Kota Cimahi yang mulai beralih teknologi sebagai bagian dari implementasi industri 4.0 yang menuntut perusahaan/industri lebih banyak menggunakan tenaga robot dibanding tenaga manusia
- e. Penyesuaian kurikulum sekolah/SMK dengan kebutuhan perusahaan/industri sehingga akan melahirkan Sekolah Unggulan

yang berpotensi menghasilkan para lulusan yang siap pakai serta menambah materi pelajaran yang bersifat soft skills

- f. Peminat Transmigrasi/Calon Transmigran reguler yang mendaftar sangat terbatas akibat kurangnya informasi dan pemahaman tentang transmigrasi;
- g. Kemampuan perusahaan dalam memberikan upah dan kesejahteraan kepada pekerja masih terbatas;
- h. Peran serikat pekerja/serikat buruh di perusahaan masih belum optimal;
- i. Masih kurangnya pemahaman tentang hak-hak dan kewajiban serta prosedur penyelesaian masalah dari sebagian pekerja masih rendah;
- j. Belum optimalnya Hubungan Industrial antara pekerja dengan pengusaha yang dapat dilihat dari jumlah perusahaan yang memiliki PKB (Perjanjian Kerja Bersama);
- k. Belum Optimalnya kesejahteraan dan perlindungan tenaga kerja yang didaftarkan melalui program Jamsostek;
- l. Belum optimalnya peran dan fungsi kelembagaan ketenagakerjaan;

Adapun isu-isu strategi yang berpengaruh adalah sebagai berikut:

Seiring dengan peningkatan Pertumbuhan ekonomi yang diikuti dengan perbaikan aktivitas produksi di sektor industri pengolahan sangat berpengaruh terhadap penurunan tingkat pengangguran. Setelah mengalami penurunan TPT secara signifikan pada tahun 2022, TPT di Kota Cimahi kembali menurun pada tahun 2023. Meskipun masih menjadi salah satu kota dengan tingkat pengangguran terbuka tertinggi di Jawa Barat, namun menurut data BPS TPT Kota Cimahi Tahun 2023 tercatat menurun sebesar 0,25 poin menjadi 10,52%.

Tingkat Pengangguran Terbuka Menurut Kabupaten/Kota (%),
2021-2023

Wilayah Jawa Barat	Tingkat Pengangguran Terbuka Menurut Kabupaten/Kota (%)		
	2021	2022	2023
Provinsi Jawa Barat	9.82	8.31	7.44
Bogor	12.22	10.64	8.47
Sukabumi	9.51	7.77	7.32
Cianjur	9.32	8.41	7.71
Bandung	8.32	6.98	6.52
Garut	8.68	7.60	7.33
Tasikmalaya	6.16	4.17	3.89
Ciamis	5.06	3.75	3.52
Kuningan	11.68	9.81	9.49
Cirebon	10.38	8.11	7.65
Majalengka	5.71	4.16	4.12
Sumedang	9.18	7.72	6.94
Indramayu	8.30	6.49	6.46
Subang	9.77	7.77	7.65
Purwakarta	10.70	8.75	7.72
Karawang	11.83	9.87	8.95
Bekasi	10.09	10.31	8.87
Bandung Barat	11.65	9.63	8.11
Pangandaran	3.25	1.56	1.52
Kota Bogor	11.79	10.78	9.39
Kota Sukabumi	10.78	8.83	8.53
Kota Bandung	11.46	9.55	8.83
Kota Cirebon	10.53	8.42	7.66
Kota Bekasi	10.88	8.81	7.90
Kota Depok	9.76	7.82	6.97
Kota Cimahi	13.07	10.77	10.52
Kota Tasikmalaya	7.66	6.62	6.55
Kota Banjar	6.09	5.53	5.43

Sumber: BPS Provinsi Jawa Barat

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 Perencanaan Strategis

Rencana Strategis Dinas Tenaga Kerja Kota Cimahi mengacu kepada visi dan misi Walikota. Visi merupakan pandangan jauh ke depan mengenai tujuan dan apa yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut, sementara Misi merupakan cara yang dilakukan untuk mewujudkan visi tersebut.

Secara teknis, Visi, Misi dan Target yang telah ditetapkan di Dinas Tenaga Kerja sebagai usaha untuk mewujudkan Visi dan Misi Kota Cimahi Tahun 2023 – 2026, harus tetap sesuai dengan Arah Pembangunan Pemerintah Kota, Prioritas Pembangunan Provinsi Jawa Barat serta Tujuan Pembangunan Nasional, sehingga dengan demikian Dinas Tenaga Kerja Kota Cimahi secara spesifik berada pada kebijakan dan Prioritas pembangunan Provinsi Jawa Barat serta Prioritas Pembangunan Nasional.

2.2 Visi dan Misi Kepala Daerah

Pemerintah Kota Cimahi Tahun 2022 sampai dengan Tahun 2024 tidak memiliki Walikota dan Wakil Walikota, sehingga Pemerintah Kota Cimahi tidak dapat menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah. Sehingga Pemerintah Kota Cimahi menetapkan Rencana Pembangunan Daerah Kota Cimahi Tahun 2023-2026 yang bertujuan untuk memberikan arah pembangunan Tahun 2023 sampai dengan 2026.

Berdasarkan Intruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi daerah dengan masa jabatan Kepala Daerah yang Berakhir Pada Tahun 2022, maka penentuan Tujuan dan Sasaran pada penyusunan Rencana Pembangunan Daerah Kota Cimahi Tahun 2023-2026

didasarkan pada Visi Misi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Cimahi Tahun 2005-2025. Visi RPJPD Kota Cimahi Tahun 2005- 2025 yaitu :

“ CIMAH KOTA CERDAS “

Dalam Visi RPJPD Kota Cimahi tahun 2005-2025: Cimahi dengan segala potensi dan keterbatasannya dituntut untuk menjadi kota yang CERDAS agar dapat bersaing dengan daerah-daerah lainnya. CERDAS dapat diartikan sebagai singkatan dari Creative yang berarti dapat berkreasi dalam bentuk aslinya serta produktif; Egalitarian yang berarti memandang kesamaan derajat manusia atau menjadi sifat dari demokratis yang saat ini sedang berkembang di negara kita; Religious adalah sifat kota yang agamis mengamalkan Sila Ketuhanan Yang Maha Esa secara konsekuen; Developable diartikan sebagai kota yang berkemampuan kompetitif untuk dibangun, Accretive diartikan sebagai kota memiliki nilai tambah untuk terus maju dan berkembang; serta Sustainable adalah tercapainya kota yang dapat mencukupi kebutuhan warganya secara berkelanjutan menjangkau lintas generasi.

Secara teknis, Visi, Misi dan Target yang telah ditetapkan di Dinas Tenaga Kerja sebagai usaha untuk mewujudkan Visi dan Misi Kota Cimahi Tahun 2023 – 2026, harus tetap sesuai dengan Arah Pembangunan Pemerintah Kota, Prioritas Pembangunan Provinsi Jawa Barat serta Tujuan Pembangunan Nasional, sehingga dengan demikian Dinas Tenaga Kerja Kota Cimahi secara spesifik berada pada kebijakan dan Prioritas pembangunan Provinsi Jawa Barat serta Prioritas Pembangunan Nasional.

Upaya perwujudan visi pembangunan jangka panjang Kota Cimahi tersebut akan dicapai melalui 5 (lima) misi pembangunan jangka panjang Kota Cimahi tahun 2005-2025 sebagai berikut :

1. Mewujudkan Kualitas Kehidupan Masyarakat Berakhlak Mulia, Berbudaya, Menerapkan Ilmu dan Teknologi, Memiliki Jejaring Sosial, Produktif dan Unggul.
2. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik

3. Meningkatkan Perekonomian yang Berdaya Saing serta Berbasis Inovasi Daerah.
4. Mewujudkan Keserasian Pembangunan yang Berkeadilan
5. Mewujudkan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan.

Dari hasil telaahan visi dan misi Walikota terpilih maka dari misi yang diajukan untuk melaksanakan visi tersebut yang sesuai dan sejalan dengan Rencana Strategis Dinas Tenaga Kerja Kota Cimahi 2023-2026 adalah :

MISI 3 : Meningkatkan Perekonomian yang Berdaya Saing serta Berbasis Inovasi Daerah

Untuk mencapai Visi dan Misi tersebut, maka disusun beberapa strategi sebagai tindakan yang harus dilaksanakan agar cita-cita tersebut dapat terwujud, yaitu :

- Peningkatan hubungan industrial yang Harmonis, Dinamis dan Berkeadilan
- Penerapan Tata Kelola Kerja yang layak
- Pengembangan pelatihan berbasis kompetensi
- Perluasan informasi kerja
- Peningkatan Kerjasama Penempatan Tenaga Kerja
- Peningkatan kerjasama transmigrasi

2.3 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD

Tujuan merupakan cerminan dari kondisi yang diinginkan. Tujuan merupakan penjabaran Visi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang lebih spesifik dan terukur sebagai upaya mewujudkan visi dan misi dalam menjawab isu strategis daerah dan permasalahan pembangunan daerah. Kondisi tersebut diharapkan dapat terwujud dalam jangka waktu 5 (lima) tahun kedepan atau pada saat masa Renstra OPD ini berakhir.

Sedangkan sasaran adalah gambaran hal yang ingin diwujudkan guna mencapai tujuan telah dirumuskan sebelumnya.

Adapun tujuan dan sasaran yang ingin diwujudkan Dinas Tenaga Kerja Kota Cimahi adalah :

Tujuan 1 :

Menurunkan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

Sasaran :

I. Meningkatnya kesempatan kerja

Program :

1. Program Penempatan Tenaga Kerja

Kegiatan :

- 1) Pelayanan Antar Kerja di Daerah Kabupaten/ Kota
 - Penyediaan Sumber Daya Pelayanan antar Kerja
 - Pelayanan antar Kerja
 - Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja
 - Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan
 - Perluasan Kesempatan Kerja
- 2) Pengelolaan Informasi Pasar Kerja
 - Pemeliharaan dan Operasional Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online
 - Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online
 - Job Fair /Bursa Kerja
- 3) Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota
 - Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)
- 4) Penerbitan Perpanjangan IMTA yang Lokasi Kerja dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
 - Koordinasi dan Sinkronisasi Perpanjangan IMTA yang Lokasi Kerja dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota

2. Program Perencanaan Tenaga Kerja

Kegiatan

- 1) Penyusunan Rencana Tenaga Kerja
 - Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro
 - Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro

3. Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi

Kegiatan

- 1) Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
 - Koordinasi dan Sinkronisasi Kerjasama Pembangunan Transmigrasi yang Berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
 - Penyuluhan Transmigrasi

II. Meningkatnya Kompetensi Pencari Kerja

Program :

Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja

Kegiatan :

- 1) Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi
 - Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi
- 2) Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta
 - Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta
- 3) Konsultansi Produktivitas pada Perusahaan Kecil
 - Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil
- 4) Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
 - Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja

III. Meningkatnya Kesejahteraan Buruh dan Keharmonisan Hubungan Industrial

Program :

Program Hubungan Industrial

Kegiatan :

- 1) Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
 - Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan
 - Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama bagi Perusahaan
 - Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja
- 2) Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota
 - Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
 - Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang berakibat/berdampak pada kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
 - Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta non afiliasi
 - Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota
 - Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja

Tujuan 2 :

Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan

Sasaran :

Meningkatnya kesempatan kerja

Program :

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Kegiatan :

- 1) Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
 - Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
 - Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD
 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- 2) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD
- 3) Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
 - Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD
- 4) Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan
- 5) Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
 - Fasilitasi Kunjungan Tamu
 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- 6) Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

- 7) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- 8) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

2.4 Strategi dan Kebijakan SKPD

Strategi adalah langkah – langkah yang berisikan program indikatif untuk mewujudkan visi, misi dan tujuan organisasi. Program indikatif yang dirumuskan adalah program yang luas untuk mendefinisikan dan mencapai tujuan SKPD dalam melaksanakan misi. SKPD memiliki peranan aktif untuk melaksanakan program sebagai strategi menghadapi perubahan lingkungan. Sedangkan kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil pemerintah daerah dalam mencapai tujuan. Visi dan Misi pembangunan yang telah dirumuskan dijabarkan dalam strategi dan arah kebijakan pembangunan untuk mencapai tujuan dan sasaran dalam kurun waktu 2023-2026.

Strategi yang akan ditempuh oleh Dinas Tenaga Kerja Kota Cimahi adalah:

- Peningkatan hubungan industrial yang Harmonis, Dinamis dan Berkeadilan
- bahwa Dinas Tenaga Kerja, memiliki peran strategis untuk menciptakan sebuah iklim yang baik yang berkaitan dengan hubungan industrial sehingga harmonisasi di lingkungan perusahaan akan terasa nyaman dan dikemas dalam nuansa keterbukaan yaitu pihak pengusaha dan organisasi pekerja/serikat pekerja. Dampak positif yang akan terjadi adalah agar pekerja dapat bekerja dengan lebih semangat

dan tenang karena tercipta sebuah keadilan untuk bersama yaitu adanya peningkatan taraf hidup pekerja dan disisi lain pengusaha pun tetap mendapatkan keuntungan.

- Penerapan Tata Kelola Kerja yang layak

Bahwa demi mewujudkan tata kelola perusahaan yang layak di Kota Cimahi, Dinas Tenaga Kerja memiliki fungsi menciptakan kebijakan, memberikan pelayanan, melaksanakan penindakan terhadap pelanggaran Peraturan Perundang – undangan sehingga diharapkan setiap perusahaan di Kota Cimahi dapat melaksanakan sarana Hubungan Industrial pada setiap aspeknya, dengan menerapkan prinsip *Good Corporate Governance* (GSC) yaitu *Fairness*, Transparansi, Akuntabilitas, Responsibilitas, Kemadirian, sesuai dengan Peraturan Perundang – undangan yang berlaku. Aspek-aspek Tata Kelola Kerja yang Layak, yaitu peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama, struktur skala upah, lembaga kerjasama bipartit, dan perlindungan seluruh pekerja dalam kepesertaan BPJS ketenagakerjaan.

- Pengembangan pelatihan berbasis kompetensi

Dinas Tenaga Kerja senantiasa melakukan pembinaan dan pelatihan terhadap pencari kerja agar mereka memiliki kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja sehingga dapat memenuhi kriteria yang dipersyaratkan oleh user. Selain itu, tujuan pelatihan yaitu agar pencari kerja menjadi tenaga kerja yang berkualitas sehingga mampu bersaing di dunia industri atau menciptakan lapangan pekerjaan sendiri.

- Perluasan informasi kerja

pembangunan bidang ketenagakerjaan, informasi dan data yang akurat berfungsi sebagai bahan pengambilan keputusan dan evaluasi untuk program tenaga kerja dan transmigrasi, khususnya informasi pasar kerja. Aspek perencanaan dan informasi sangat diperlukan, untuk itu perlu dilakukan pendataan tenaga kerja dan transmigrasi baik pada tingkat nasional maupun tingkat daerah, sehingga menyediakan

informasi mengenai ketenagakerjaan dan transmigrasi secara makro, sectoral dan regional yang lebih akurat dan tepat waktu.

- Peningkatan Kerjasama Penempatan Tenaga Kerja

Peningkatan kerjasama penempatan tenaga kerja bertujuan sebagai upaya yang dilakukan oleh Dinas Tenaga Kerja untuk memberikan kesempatan kerja seluas-luasnya bagi para pencari kerja yang termasuk dalam angkatan kerja untuk mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan kompetensi yang dimilikinya dan juga memberikan tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan pemberi kerja sehingga diharapkan upaya ini dapat menekan dan mengurangi jumlah pengangguran, menmbangun hubungan dan jejaring kerja agar ada perluasan kesempatan kerja dan mengurangi kemiskinan yang ada di Kota Cimahi.

- Peningkatan kerjasama transmigrasi

Program transmigrasi adalah salah satu upaya pemerintah dalam mempercepat pengembangan wilayah dan pembangunan di suatu daerah, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat di perkotaan maupun di pedesaan yang relatif hidup dibawah garis kemiskinan (prasejahtera). Sehingga upaya-upaya tersebut sangat diperlukan setiap tahunnya dengan harapan program transmigrasi dapat memberikan kontribusi yang positif dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan daerah.

Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

VISI	MEWUJUDKAN CIMAH I BARU, MAJU, AGAMIS DAN BERBUDAYA		
MISI 3	Memberdayakan perekonomian daerah berbasis ekonomi kerakyatan yang berorientasi pada pengembangan sektor jasa berbasis teknologi informasi dan industri kecil menengah dalam upaya pengentasan kemiskinan		
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Menurunkan Tingkat Pengangguran Kota Cimahi	<ul style="list-style-type: none"> - Meningkatnya Kesejahteraan Buruh dan Keharmonisan Hubungan Industrial 	<ul style="list-style-type: none"> - Peningkatan hubungan industrial yang Harmonis, Dinamis dan Berkeadilan - Penerapan Tata Kelola Kerja yang layak 	<p>Menurunkan angka perselisihan pengusaha dan pekerja</p> <p>Peningkatan jumlah Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama</p>
	<ul style="list-style-type: none"> - Meningkatnya Kompetensi Pencari Kerja - Meningkatnya Penempatan Tenaga Kerja 	<ul style="list-style-type: none"> - Pengembangan pelatihan berbasis kompetensi - Perluasan informasi kerja - Peningkatan Kerjasama Penempatan Tenaga Kerja - Peningkatan kerjasama transmigrasi 	<ul style="list-style-type: none"> - Memberikan pelatihan dan sertifikasi - Menyediakan pusat informasi ketenagakerjaan - Membuka kesempatan pemagangan dan penempatan tenaga kerja - Menempatkan calon transmigran
Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan	Meningkatnya Kualitas dan Inovasi Pelayanan Publik	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Peningkatan Kualitas Layanan Administrasi Pemerintahan Daerah
			Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Daerah

**RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN PENDANAAN DINAS TENAGA KERJA KOTA CIMAHI
PERIODE 2023 – 2026**

Tujuan	Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan							
					Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026	
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
Menurunkan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)			Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	13,07 Persen	12,61 Persen		12,4 Persen		12,2 Persen		11,9 Persen	
	Meningkatnya kesempatan kerja		Persentase Tenaga Kerja Yang Ditempatkan	77,68 Persen	78 Persen		79 Persen		80 Persen		80 Persen	
		PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	jumlah tenaga kerja siap pakai yang disalurkan dan ditempatkan	1037 orang	1000 orang	809.533.800	1000 orang	766.119.043	1000 orang	721.261.666	1000 orang	732.294.468
		Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota	Indek Kepuasan Masyarakat (IKM)	86,52 Nilai	86 Nilai	252.159.300	86 Nilai	282.159.300	86 Nilai	252.159.300	86 Nilai	252.159.300
		Penyediaan Sumber Daya Pelayanan antar Kerja	Jumlah SDM Pelayanan antar Kerja yang Mendapatkan Pelatihan Melalui Bimtek dan lain-lain untuk Peningkatan Kompetensi	n.a	-	0	1 Orang	30.000.000	-	0	-	0
		Pelayanan antar Kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang Ditempatkan Melalui Layanan AKAD dan AKL	1037 Orang	1.000 Orang	171.099.200	1.000 Orang	171.099.200	1.000 Orang	171.099.200	1.000 Orang	171.099.200
		Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan	n.a	100 Orang	37.076.700	100 Orang	37.076.700	100 Orang	37.076.700	100 Orang	37.076.700
		Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan	Jumlah Tenaga Kerja Disabilitas yang Mendapatkan Fasilitas Layanan ULD	n.a	50 Orang	18.000.000	50 Orang	18.000.000	50 Orang	18.000.000	50 Orang	18.000.000
		Perluasan Kesempatan Kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui program Perluasan Kesempatan Kerja	n.a	80 Orang	25.983.400	80 Orang	25.983.400	80 Orang	25.983.400	80 Orang	25.983.400
		Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Jumlah Media Informasi Pasar Kerja yang dikelola	5 Media	5 Media	387.492.200	5 Media	318.754.400	5 Media	318.754.400	5 Media	318.754.400
		Pemeliharaan dan Operasional Aplikasi Informasi Pasar Kerja <i>Online</i>	Jumlah Data dan Informasi yang Dihasilkan Aplikasi Informasi Pasar Kerja <i>Online</i>	1 Dokumen	1 Dokumen	137.877.000	1 Dokumen	137.877.000	1 Dokumen	137.877.000	1 Dokumen	137.877.000
		Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja <i>Online</i>	Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja yang Terdaftar dalam Pasar Kerja Melalui Sistem <i>Online</i> (Karir Hub)	1335 Orang	1.700 Orang	180.877.400	1.700 Orang	180.877.400	1.700 Orang	180.877.400	1.700 Orang	180.877.400



		Job Fair /Bursa Kerja	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair /Bursa Kerja	0 Orang	50 Orang	68.737.800	-	0	-	0	-	0
		Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Pra dan Purna PMI yang di fasilitasi	n.a	40 Orang	144.389.600	40 Orang	139.712.643	40 Orang	124.855.266	40 Orang	135.888.068
		Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)	Jumlah CPMI/ PMI yang Dilindungi dan Ditingkatkan Kompetensinya	n.a	15 Orang	144.389.600	15 Orang	139.712.643	15 Orang	124.855.266	15 Orang	135.888.068
		Penerbitan Perpanjangan IMTA yang Lokasi Kerja dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Tenaga Kerja Asing yang dilayani	34 Orang	40 Orang	25.492.700	40 Orang	25.492.700	40 Orang	25.492.700	40 Orang	25.492.700
		Koordinasi dan Sinkronisasi Perpanjangan IMTA yang Lokasi Kerja dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perpanjangan IMTA yang diterbitkan	34 Dokumen	40 Dokumen	25.492.700	40 Dokumen	25.492.700	40 Dokumen	25.492.700	40 Dokumen	25.492.700
		PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	prosentase koordinasi pelaksanaan penempatan transmigrasi	0 persen	100 persen	30.000.000	100 persen	21.144.178	0 persen	0	0 persen	0
		Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Koordinasi yang dilaksanakan	0 Kali	4 Kali	30.000.000	4 Kali	21.144.178	0 Kali	0	0 Kali	0
		Koordinasi dan Sinkronisasi Kerja Sama Pembangunan Transmigrasi yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kerja Sama Pembangunan Transmigrasi yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	n.a	4 Laporan	30.000.000	-	0	-	0	-	0
		Penyuluhan Transmigrasi	Jumlah Calon Transmigran yang Mendapatkan Penyuluhan	n.a	-	0	25 Orang	21.144.178	-	0	-	0
		Pelatihan Transmigrasi	Jumlah Calon Transmigran yang Mendapatkan Pelatihan	n.a	-	0	-	0	-	0	-	0
		Pemindahan dan Penempatan Transmigran yang Berasal dari Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam Provinsi	Jumlah Calon Transmigran yang ditempatkan	n.a	-	0	-	0	-	0	-	0
		Meningkatnya Kompetensi Pencari Kerja	Persentase Pencari Kerja Terdaftar yang memiliki standar Kompetensi	4,28% Persen	90 Persen		90 Persen		90 Persen		90 Persen	
		PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan	14,08 persen	15 persen	1.959.204.000	15 persen	1.959.204.000	15 persen	1.168.000.000	15 persen	1.172.865.542



		Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	Jumlah Jenis Pelatihan yang dilaksanakan	3 Pelatihan	4 Pelatihan	1.891.204.000	4 Pelatihan	1.891.204.000	3 Pelatihan	1.100.000.000	3 Pelatihan	1.104.865.542
		Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n	188 Orang	300 Orang	1.891.204.000	300 Orang	1.891.204.000	200 Orang	1.100.000.000	200 Orang	1.104.865.542
		Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	2 Kali	1 Kali	23.000.000	1 Kali	23.000.000	1 Kali	23.000.000	1 Kali	23.000.000
		Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Dibina	32 Lembaga	33 Lembaga	23.000.000	33 Lembaga	23.000.000	33 Lembaga	23.000.000	33 Lembaga	23.000.000
		Konsultasi Produktivitas pada Perusahaan Kecil	Jumlah Konsultasi yang dilaksanakan	n.a	1 Kali	15.000.000	1 Kali	15.000.000	1 Kali	15.000.000	1 Kali	15.000.000
		Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil	Jumlah Perusahaan Kecil yang Mendapat Konsultasi Peningkatan Produktivitas	n.a	50 Perusahaan	15.000.000	50 Perusahaan	15.000.000	50 Perusahaan	15.000.000	50 Perusahaan	15.000.000
		Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaksanaan Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja	n.a	1 Kali	30.000.000	1 Kali	30.000.000	1 Kali	30.000.000	1 Kali	30.000.000
		Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja	Jumlah Dokumen Hasil Pengukuran Produktivitas dan Daya Saing Tenaga Kerja di Tingkat Daerah	n.a	1 Dokumen	30.000.000	1 Dokumen	30.000.000	1 Dokumen	30.000.000	1 Dokumen	30.000.000
	Meningkatnya Kesejahteraan Buruh dan Keharmonisan Hubungan Industrial		Persentase perselisihan buruh dan pengusaha yang diselesaikan	95,65 Persen	90 Persen		90 Persen		90 Persen		90 Persen	
		PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja	90 persen	90 persen	54.000.000	90 persen	54.000.000	90 persen	35.000.000	90 persen	60.000.000
		Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	Jumlah Dokumen RTK	1 Dokumen	1 Dokumen	54.000.000	1 Dokumen	54.000.000	1 Dokumen	35.000.000	1 Dokumen	60.000.000
		Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro	Jumlah Perusahaan yang Menyusun RTK Mikro	n.a	20 Perusahaan	54.000.000	20 Perusahaan	54.000.000	15 Perusahaan	35.000.000	25 Perusahaan	60.000.000
		PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak	34,19 persen	35 persen	1.397.262.200	37 persen	1.417.262.200	39 persen	1.264.264.200	41 persen	1.264.264.200



		Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Dokumen Peraturan Perusahaan dan Perjanjian Kerja Bersama	41 Dokumen	42 Dokumen	433.023.000	43 Dokumen	433.023.000	44 Dokumen	400.025.000	45 Dokumen	400.025.000
		Pengesahan Peraturan Bagi Perusahaan	Jumlah Perusahaan yang Melaksanakan Pengesahan Peraturan Perusahaan yang Terkait dengan Hubungan Industrial dan Terdaftar di WLKP Online	37 Perusahaan	38 Perusahaan	46.499.000	38 Perusahaan	46.499.000	38 Perusahaan	30.000.000	38 Perusahaan	30.000.000
		Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama Bagi Perusahaan	Jumlah Perusahaan yang Menyusun Perjanjian Kerja Bersama	4 Perusahaan	4 Perusahaan	46.499.000	4 Perusahaan	46.499.000	4 Perusahaan	30.000.000	4 Perusahaan	30.000.000
		Penyelenggaraan Pendataan Dan Informasi Sarana Hubungan Industrial Dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja	Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan	1 Laporan	1 Laporan	340.025.000	1 Laporan	340.025.000	1 Laporan	340.025.000	1 Laporan	340.025.000
		Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Perselisihan yang difasilitasi	46 Perkara	45 Perkara	964.239.200	42 Perkara	984.239.200	38 Perkara	864.239.200	35 Perkara	864.239.200
		Pencegahan perselisihan hubungan industrial, mogok kerja dan penutupan perusahaan di daerah kabupaten kota	Jumlah Perselisihan yang Dicegah	2 Perkara	2 Perkara	517.180.100	2 Perkara	517.180.100	2 Perkara	417.180.100	2 Perkara	417.180.100
		Penyelesaian perselisihan hubungan industrial, mogok kerja dan penutupan perusahaan di daerah kabupaten kota	Jumlah Perkara Perselisihan yang terselesaikan	44 Perkara	43 Perkara	86.195.100	43 Perkara	86.195.100	43 Perkara	86.195.100	43 Perkara	86.195.100
		penyelenggaraan verifikasi dan rekapitulasi keanggotaan pada organisasi pengusaha, federasi dan konfederasi serikat pekerja / serikat buruh dan non afiliasi	Jumlah Asosiasi Pengusaha dan Serikat Pekerja yang Diverifikasi	1. 1 Asosiasi 2. 6 Serikat Pekerja	7 Asosiasi	198.572.000	7 Asosiasi	198.572.000	7 Asosiasi	198.572.000	7 Asosiasi	198.572.000
		pelaksanaan operasional lembaga kerja sama tripartit daerah kabupaten/ kota	Jumlah LKS Tripartit yang Dibina	1 Lembaga	1 Lembaga	162.292.000	1 Lembaga	162.292.000	1 Lembaga	162.292.000	1 Lembaga	162.292.000
		Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	Terlaksananya Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	n.a	-	0	64.000	20.000.000	-	0	-	0



Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan	Meningkatnya Kualitas dan Inovasi Pelayanan Publik		Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi Disnaker	n.a Nilai	60 Nilai		60 Nilai		60 Nilai		60 Nilai	
	Meningkatnya Kualitas dan Inovasi Pelayanan Publik	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	- Indeks Profesionalitas ASN - Nilai IKM Perangkat daerah - Nilai SAKIP Perangkat Daerah	- n.a - 86 nilai - BB nilai	- 50.00 nilai - 86 nilai - BB nilai		- 50.00 nilai - 86 nilai - BB nilai		- 50.00 nilai - 86 nilai - BB nilai		- 50.00 nilai - 86 nilai - BB nilai	
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Terfasilitasinya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 Persen	95 Persen	120.682.200	95 Persen	120.682.200	95 Persen	120.682.200	95 Persen	120.682.200
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	2 Dokumen	22.853.800	2 Dokumen	22.853.800	2 Dokumen	22.853.800	2 Dokumen	22.853.800
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	6.043.700	1 Dokumen	6.043.700	1 Dokumen	6.043.700	1 Dokumen	6.043.700
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	6.462.000	1 Dokumen	6.462.000	1 Dokumen	6.462.000	1 Dokumen	6.462.000
		Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	3.394.900	1 Dokumen	3.394.900	1 Dokumen	3.394.900	1 Dokumen	3.394.900
		Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	3.404.000	1 Dokumen	3.404.000	1 Dokumen	3.404.000	1 Dokumen	3.404.000
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	8 Laporan	8 Laporan	78.523.800	8 Laporan	78.523.800	8 Laporan	78.523.800	8 Laporan	78.523.800
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Terfasilitasinya Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN dan Laporan Keuangan Perangkat Daerah	100 Persen	100 Persen	5.225.565.309	100 Persen	5.328.980.066	100 Persen	5.487.333.911	100 Persen	5.542.055.829
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	n.a	27 Orang/Bulan	5.170.737.809	27 Orang/Bulan	5.274.152.566	27 Orang/Bulan	5.432.506.411	27 Orang/Bulan	5.487.228.329
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1 Laporan	5.628.400	1 Laporan	5.628.400	1 Laporan	5.628.400	1 Laporan	5.628.400



		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	13 Laporan	17 Laporan	49.199.100	17 Laporan	49.199.100	17 Laporan	49.199.100	17 Laporan	49.199.100
		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Terfasilitasinya Pengamanan Barang Milik Daerah	100 Persen	100 Persen	23.210.000	100 Persen	23.210.000	100 Persen	23.210.000	100 Persen	23.210.000
		Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	3 Dokumen	3 Dokumen	23.210.000	3 Dokumen	23.210.000	3 Dokumen	23.210.000	3 Dokumen	23.210.000
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Terfasilitasinya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 Persen	100 Persen	70.199.700	100 Persen	70.199.700	100 Persen	70.199.700	100 Persen	70.199.700
		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	45 Orang	47 Orang	70.199.700	47 Orang	70.199.700	47 Orang	70.199.700	47 Orang	70.199.700
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Terfasilitasinya Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 Persen	100 Persen	282.862.822	100 Persen	282.862.822	100 Persen	282.862.822	100 Persen	282.862.822
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	2 Paket	30.062.800	2 Paket	30.062.800	2 Paket	30.062.800	2 Paket	30.062.800
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	33.603.200	12 Paket	33.603.200	12 Paket	33.603.200	12 Paket	33.603.200
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	13 Paket	17.646.822	13 Paket	17.646.822	13 Paket	17.646.822	13 Paket	17.646.822
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	12 Dokumen	12 Dokumen	24.000.000	12 Dokumen	24.000.000	12 Dokumen	24.000.000	12 Dokumen	24.000.000
		Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	12 Laporan	6.000.000	12 Laporan	6.000.000	12 Laporan	6.000.000	12 Laporan	6.000.000
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan	171.550.000	12 Laporan	171.550.000	12 Laporan	171.550.000	12 Laporan	171.550.000
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Terfasilitasinya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 Persen	100 Persen	282.905.000	100 Persen	282.905.000	100 Persen	282.905.000	100 Persen	282.905.000



		Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	7 Unit	7 Unit	282.905.000	7 Unit	282.905.000	7 Unit	282.905.000	7 Unit	282.905.000
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Terfasilitasinya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	100 Persen	103.188.000	100 Persen	103.188.000	100 Persen	103.188.000	100 Persen	103.188.000
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	18.600.000	12 Laporan	18.600.000	12 Laporan	18.600.000	12 Laporan	18.600.000
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	84.588.000	12 Laporan	84.588.000	12 Laporan	84.588.000	12 Laporan	84.588.000
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Terfasilitasinya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	100 Persen	305.336.678	100 Persen	305.336.678	100 Persen	305.336.678	100 Persen	305.336.678
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	3 Unit	3 Unit	219.799.000	3 Unit	219.799.000	3 Unit	219.799.000	3 Unit	219.799.000
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	85.537.678	1 Unit	85.537.678	1 Unit	85.537.678	1 Unit	85.537.678



2.5 Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Penyusunan dokumen Perjanjian Kinerja harus memperhatikan RPD, Rencana Strategis Perangkat Daerah, Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah, dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran. Pejabat eselon II, III, dan IV wajib membuat dokumen Perjanjian Kinerja paling lambat satu bulan setelah Dokumen Pelaksanaan Anggaran ditetapkan. Dokumen Perjanjian Kinerja eselon II memuat sasaran strategis, indikator kinerja, target kinerja, program dan anggaran. Dokumen Perjanjian Kinerja eselon III memuat program, indikator program, target, kegiatan, dan anggaran. Dokumen Perjanjian Kinerja eselon IV memuat kegiatan, output, target, dan anggaran.

Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Cimahi

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
Misi Tiga : Meningkatkan Perekonomian yang Berdaya Saing serta Berbasis Inovasi Daerah.			
1	Meningkatnya kesempatan kerja	Persentase Tenaga Kerja Yang Ditempatkan	78%
2	Meningkatnya Kompetensi Pencari Kerja	Persentase Pencari Kerja Terdaftar yang memiliki standar Kompetensi	90%
3	Meningkatnya Kesejahteraan Buruh dan Keharmonisan Hubungan Industrial	Persentase perselisihan buruh dan pengusaha yang diselesaikan	90%
4	Meningkatnya Kualitas dan Inovasi Pelayanan Publik	Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi Disnaker	60 Nilai

NO.	PROGRAM	ANGGARAN
1	Program Penempatan Tenaga Kerja	Rp. 925.102.800
2	Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	Rp. 3.285.403.900
3	Program Perencanaan Tenaga Kerja	Rp. 52.640.000
4	Program Hubungan Industrial	Rp. 1.195.810.175
5	Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi	Rp. 29.250.000
6	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 6.240.203.934
		Rp. 11.728.410.809

Perjanjian Kinerja Perubahan Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Cimahi

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
Misi Tiga : Meningkatkan Perekonomian yang Berdaya Saing serta Berbasis Inovasi Daerah.			
1	Meningkatnya kesempatan kerja	Persentase Tenaga Kerja Yang Ditempatkan	78%
2	Meningkatnya Kompetensi Pencari Kerja	Persentase Pencari Kerja Terdaftar yang memiliki standar Kompetensi	90%
3	Meningkatnya Kesejahteraan Buruh dan Keharmonisan Hubungan Industrial	Persentase perselisihan buruh dan pengusaha yang diselesaikan	90%
4	Meningkatnya Kualitas dan Inovasi Pelayanan Publik	Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi Disnaker	60 Nilai



NO.	PROGRAM	ANGGARAN
1	Program Penempatan Tenaga Kerja	Rp. 983.666.800
2	Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	Rp. 3.764.725.407
3	Program Perencanaan Tenaga Kerja	Rp. 123.556.000
4	Program Hubungan Industrial	Rp. 1.195.809.550
5	Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi	Rp. 29.250.000
6	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 5.775.233.043
		Rp. 11.872.240.800

Mencermati target Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Tenaga Kerja pada Anggaran Murni dan Perubahan Tahun 2023 terdapat penambahan yang dituangkan dalam Anggaran Perubahan Tahun 2023. Hal ini disebabkan karena penambahan anggaran dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) Rp. 475,925,507 yang di alokasikan untuk :

- Pelatihan Favorista sebanyak 110 Orang
- Pelatihan Kuliner sebanyak 100 Orang

Total sebanyak 210 Orang. Selain itu terdapat juga pergeseran-pergeseran internal untuk Penambahan Gaji Tenaga Administrasi Non ASN.